

**Pengaruh Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan sebagai Hambatan dalam Pencapaian SDGs di Indonesia**

***The Influence of Poverty and Income Inequality as Barriers to Achieving the SDGs in Indonesia***

Febriyanti Revalentina Naibaho<sup>1</sup>, Ruth Hutahuruk<sup>2</sup>, Pesta Sugianti Simanungkalit<sup>3</sup>,  
Khairuddin Ependi Tambunan<sup>4</sup>

[febriyantirevalentina15@gmail.com](mailto:febriyantirevalentina15@gmail.com)

<sup>1234</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara 20221, Indonesia.

**Abstract**

*This study examines the impact of poverty and income inequality as barriers to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. This issue is critical due to persistent disparities in access to resources, education, and economic opportunities, which hinder inclusive development toward Indonesia Gold 2045. This research employs a qualitative method with a literature study approach by analyzing various scientific sources, including journals, books, and data from the Central Statistics Agency (BPS). The findings indicate that poverty is multidimensional and influenced by factors such as human capital quality, unemployment, and access to basic services. Meanwhile, income inequality exacerbates poverty through unequal income distribution and limited social mobility. Both factors are proven to be major obstacles in achieving the SDGs, particularly in poverty eradication and inequality reduction, thus requiring integrated and sustainable policy interventions.*

**Keywords:** *Poverty, Income Inequality, Inclusive Development, SDGs Achievement, Social Welfare*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas pengaruh kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai hambatan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting karena masih adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang menghambat pembangunan inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas sumber daya manusia, pengangguran, dan akses terhadap layanan dasar. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan memperburuk kondisi kemiskinan melalui distribusi ekonomi yang tidak merata dan rendahnya mobilitas sosial. Kedua faktor tersebut terbukti menjadi hambatan utama dalam pencapaian SDGs, terutama pada tujuan pengentasan

kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Pembangunan Inklusif, Pencapaian SDGs dan Kesejahteraan Masyarakat

## Pendahuluan

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama yang menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan, kedua persoalan ini belum sepenuhnya terselesaikan dan justru menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi di berbagai kelompok masyarakat. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Dalam konteks pembangunan nasional, Indonesia memiliki visi besar menuju Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang merata. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Namun, visi tersebut akan sulit tercapai apabila masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan struktural yang belum teratasi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidupnya (Suryawati, 2005). Namun, permasalahan kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga berdampak pada aspek sosial dan stabilitas suatu negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Chen dan Ravallion (2012) yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik, terutama ketika kelompok masyarakat marginal tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi.

Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat luas, sehingga pembangunan yang terjadi tidak bersifat inklusif dan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu (Singh & Chudasama, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.

Lebih lanjut, Ravallion (2012) menegaskan bahwa tingginya tingkat kemiskinan tidak hanya mencerminkan rendahnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya merupakan akibat dari kegagalan pembangunan, tetapi juga menjadi faktor utama yang

menghambat proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, tanpa upaya yang serius dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pencapaian pembangunan berkelanjutan serta visi Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud secara optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dari berbagai perspektif. Penelitian di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Zulyanto (2022) dalam *Convergence: The Journal of Economic Development* menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pendidikan dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya seperti infrastruktur dan kondisi ekonomi daerah.

Di sisi lain, penelitian mengenai kebijakan publik oleh Murdiyana dan Mulyana (2017) dalam *Jurnal Politik Pemerintahan* menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun telah terdapat berbagai program dan kebijakan, implementasi yang belum optimal menyebabkan hasil yang dicapai belum mampu mengurangi kesenjangan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan dan ketimpangan memerlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2023) dalam *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan terbukti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efektivitas pembangunan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena cenderung membahas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara terpisah atau hanya dari satu aspek tertentu, baik dari sisi pendidikan, kebijakan, maupun pertumbuhan ekonomi, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antar variabel tersebut dalam pembangunan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum secara spesifik mengkaji peran kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai faktor penghambat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam konteks pembangunan di Indonesia yang menekankan pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara lebih komprehensif hubungan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pencapaian SDGs di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan pembangunan serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini

berfokus pada bagaimana kemiskinan mempengaruhi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia serta bagaimana ketimpangan pendapatan turut memperburuk capaian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana kedua faktor tersebut secara bersama-sama berperan sebagai hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia serta mengkaji perannya sebagai hambatan utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Selain itu, kedua faktor tersebut juga diperkirakan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan, serta menunjukkan bahwa tanpa upaya yang terintegrasi dalam mengatasi kedua permasalahan tersebut, pencapaian target SDGs akan sulit terwujud secara optimal.

## Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pencapaian SDGs. Proses ini mencakup pengumpulan, pengelompokan, serta penelaahan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dan juga dilakukan dengan pencarian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pencarian data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, data diperoleh melalui sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan badan pusat statistik. Data yang telah dipilih kemudian disajikan secara sistematis agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan hubungan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pencapaian SDGs di Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai peran kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai hambatan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil analisis penelitian berdasarkan pendekatan yang telah digunakan, dengan menekankan keterkaitan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Pembahasan dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada konsep teoritis, data empiris, serta hasil penelitian terdahulu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Secara khusus, analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan peran keduanya sebagai hambatan dalam pembangunan berkelanjutan.

## 1. Kemiskinan

Secara epistemologi, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang berarti serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan menggambarkan keadaan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan sehingga tidak dapat mencapai standar hidup yang layak. Selain itu kemiskinan juga bersifat multidimensional tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap peluang ekonomi.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok ekonomi untuk menjamin kelangsungan hidupnya (Suryawati, 2005). Ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap berbagai kebutuhan dasar. Chen dan Ravallion (2012) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kondisi kemiskinan pernah berkaitan dengan instabilitas politik, yang terjadi pada masa krisis ekonomi tahun 1998. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu penting dan perhatian utama bagi pembuat kebijakan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak yang diukur berdasarkan garis kemiskinan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sementara itu menurut (world bank, 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, serta keterbatasan dalam memperoleh kesempatan kerja. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan menurun sebesar 0,32 persen poin dibandingkan September 2024. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, yang berarti berkurang sebanyak 0,49 juta orang dibandingkan Maret 2025 dan menurun sebesar 0,70 juta orang dibandingkan September 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun jumlah penduduk miskin masih tergolong besar sehingga tetap menjadi tantangan dalam pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2026).

Dilihat berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 10,72 persen, juga mengalami penurunan dari 11,03 persen pada Maret 2025. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 0,09 juta orang, yaitu dari 11,27 juta orang menjadi 11,18 juta orang. Adapun di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang lebih besar, yaitu sebesar 0,40 juta orang, dari 12,58 juta orang menjadi 12,18 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan kemiskinan, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yang mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Selain itu, kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan Tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,290, menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 1,365 dan September 2024 sebesar 1,364. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,303, juga mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,319 dan September 2024 sebesar 0,322. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin semakin mengecil, walaupun ketimpangan masih tetap ada.

Namun jika dilihat berdasarkan wilayah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada September 2025, nilai P1 di perkotaan sebesar 1,040, sedangkan di perdesaan mencapai 1,661. Hal yang sama juga terjadi pada P2, yaitu sebesar 0,245 di perkotaan dan 0,390 di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di desa tidak hanya lebih tinggi secara jumlah, tetapi juga lebih dalam dan parah dibandingkan di perkotaan. Selama periode 2014 hingga 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun, terdapat beberapa periode peningkatan, seperti pada tahun 2015 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Setelah itu, kondisi ekonomi yang mulai pulih mendorong penurunan kembali tingkat kemiskinan hingga tahun 2025.

Selain itu, garis kemiskinan menjadi indikator penting dalam mengukur kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi agar seseorang tidak tergolong miskin. Pada September 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan, yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan hidup masyarakat. Jika dilihat dari komponennya, kontribusi kebutuhan makanan terhadap garis kemiskinan masih lebih besar dibandingkan non-makanan, yaitu sebesar 73,81 persen di perkotaan dan 76,11 persen di perdesaan. Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar adalah beras, diikuti oleh rokok kretek filter, telur ayam ras, dan daging ayam ras, sementara itu komoditas

non-makanan didominasi oleh perumahan, bensin, dan listrik. Rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2025 juga mengalami peningkatan mencapai Rp3.053.269 per bulan, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup layak semakin besar.

Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun sosial, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan formal dan sumber daya ekonomi masih menjadi kendala utama. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan juga memperburuk kondisi kemiskinan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pengeluaran per kapita, kepadatan penduduk, akses sanitasi, dan angka harapan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat sangat berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan.

Kemiskinan juga memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata sehingga sebagian masyarakat sulit keluar dari kondisi miskin. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan tanpa kemiskinan (no poverty) dan pengurangan ketimpangan (reduced inequalities). Kemiskinan yang masih tinggi menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga memperlambat pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan struktural. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan yang tepat seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, agar dapat mendukung pencapaian SDGs serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

## **2. Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi di mana distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata, sehingga sebagian kelompok menguasai sumber daya ekonomi lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Menurut Hidayat dan Erlyn (2021) dalam Jurnal *Economia*, ketimpangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pembangunan, tetapi juga oleh faktor struktural seperti heterogenitas sosial, kualitas kebijakan pemerintah, serta lemahnya perlindungan terhadap hak kepemilikan (property rights). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan sistem kelembagaan dan tata kelola suatu negara.

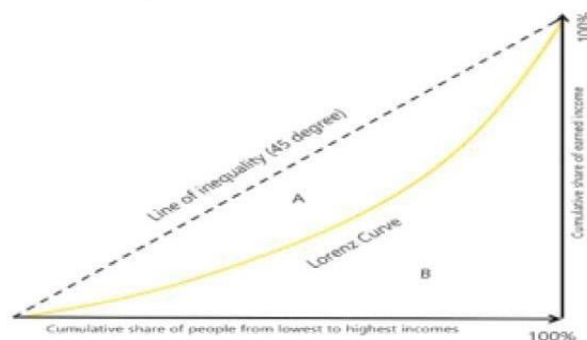
Pandangan tersebut sejalan dengan konsep ketimpangan menurut Haughton dan Khandker (2009) dalam penelitian Lestari dkk. yang menyatakan bahwa ketimpangan berfokus

pada distribusi kesejahteraan di seluruh populasi, bukan hanya pada kelompok miskin. Dengan demikian, ketimpangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena menyangkut posisi relatif ekonomi individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ketimpangan menjadi indikator penting untuk menilai apakah hasil pembangunan telah dinikmati secara merata atau belum.

Lebih lanjut, Ganie-Rochman (2013) menjelaskan ketimpangan melalui tiga perspektif utama. Pertama, ketimpangan sebagai gambaran distribusi hasil pembangunan, yang menunjukkan bagaimana pendapatan dan aset tersebar di antara kelompok masyarakat. Kedua, ketimpangan dilihat dari perbedaan antar sektor ekonomi, di mana sektor modern dengan pertumbuhan tinggi cenderung lebih menguntungkan kelompok menengah atas dibandingkan sektor ekonomi rakyat. Ketiga, ketimpangan muncul akibat rendahnya kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses keuangan, yang menyebabkan kelompok masyarakat bawah sulit meningkatkan taraf hidupnya. Ketiga perspektif ini memperkuat bahwa ketimpangan di Indonesia bersifat struktural dan multidimensional.

Secara umum, ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien Gini, yaitu suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Koefisien ini menggambarkan distribusi pendapatan melalui Kurva Lorenz, di mana semakin tinggi nilai koefisien Gini, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan dalam suatu wilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Indonesia masih berada pada kategori sedang, namun cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat.

**Gambar 1 Kurva Lorenz**



Sumber : Pratama, (2022)

Ketimpangan pendapatan dalam suatu negara juga dapat dianalisis menggunakan Kurva Lorenz, yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan masyarakat. Pada Gambar 1 terlihat bahwa garis diagonal menunjukkan kondisi pemerataan sempurna, di mana setiap kelompok masyarakat memperoleh bagian pendapatan yang sama. Namun, kurva Lorenz yang berada di bawah garis tersebut menunjukkan kondisi nyata distribusi pendapatan yang tidak

merata. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara sebagian lainnya memperoleh bagian yang lebih kecil. Kondisi ketimpangan yang tinggi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam tujuan pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tidak terkendali dapat memperlambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, diskriminasi ekonomi, infrastruktur yang belum merata, serta konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (cerdasco.com, 2022). Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat ketimpangan yang ada, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin sulit diatasi. Dampak dari ketimpangan pendapatan sangat signifikan terhadap pembangunan. M. Syawie (2013) menyatakan bahwa peningkatan ketimpangan berjalan seiring dengan meningkatnya kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketimpangan juga menimbulkan eksklusi sosial-ekonomi, di mana sebagian masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Juoro (2013) yang menyatakan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta berpotensi memicu konflik sosial akibat kesenjangan yang mencolok.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori cumulative causation oleh Gunnar Myrdal, yang menyatakan bahwa ketimpangan akan terus meningkat karena adanya proses sebab-akibat yang saling memperkuat antara kelompok yang maju dan tertinggal. Selain itu, menurut Mudrajad Kuncoro, ketimpangan tercermin dari dominasi pendapatan oleh kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya tertinggal dalam akses ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan, ketimpangan akan terus berlanjut dan semakin melebar.

Berdasarkan berbagai faktor dan dampak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh besar sebagai hambatan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, termasuk dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan pembangunan tidak berjalan secara merata, sehingga sebagian masyarakat tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga memperlambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan prinsip keadilan dan tidak ada yang tertinggal.

Lebih lanjut, dalam konteks SDGs Desa sebagaimana dijelaskan oleh Sruyanti (2022) dalam *Journal Publicuho*, ketimpangan juga terlihat dari perbedaan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar di desa menyebabkan kualitas hidup masyarakat tidak merata, sehingga menghambat pencapaian

pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya terjadi antar individu, tetapi juga antar wilayah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai strategi yang komprehensif. Supriawan dalam Circle Archive menekankan pentingnya kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan program bantuan sosial. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap usaha kecil juga diperlukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, penguatan kelembagaan, penegakan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan terbukti menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Tanpa upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan, maka tujuan pembangunan inklusif serta visi Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud secara optimal.

### **3. Kemiskinan Dan Ketimpangan Sebagai Hambatan SDGs**

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang layak. Berdasarkan hasil penelitian, kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa variabel utama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan tingkat pengangguran. IPM terbukti memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa strategi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*human-centered development*) merupakan pendekatan yang paling relevan dalam jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan.

Namun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi ekonomi. Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ini mencerminkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar lainnya berada dalam kondisi keterbatasan. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung bersifat eksklusif dan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Lebih lanjut, fenomena ketimpangan juga berdampak pada rendahnya mobilitas sosial masyarakat. Kelompok masyarakat miskin cenderung sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta peluang

kerja yang layak. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “poverty trap” atau perangkap kemiskinan, di mana kemiskinan menjadi kondisi yang diwariskan antar generasi. Dalam konteks ini, ketimpangan tidak hanya menjadi akibat dari kemiskinan, tetapi juga menjadi penyebab utama yang memperkuat keberlanjutan kemiskinan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu “No Poverty”, berbagai hambatan dalam implementasinya masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah belum optimalnya integrasi antara kebijakan ekonomi dan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan sering kali bersifat parsial dan tidak terkoordinasi secara efektif. Misalnya, program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin belum sepenuhnya diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara signifikan.

Selain itu, faktor eksternal seperti krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 juga ikut memperburuk kondisi kemiskinan. Pandemi telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, serta penurunan daya beli masyarakat. Dampak ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan yang bekerja di sektor informal, yang pada umumnya tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, terjadi peningkatan angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target SDGs sangat rentan terhadap guncangan eksternal, sehingga diperlukan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif dan responsif terhadap krisis.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya inklusif. Meskipun terdapat peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), manfaat dari pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar kesenjangan dan memperkuat ketimpangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi hasil pembangunan yang lebih adil dan merata.

Hambatan lain dalam pencapaian SDGs adalah keterbatasan kualitas data dan targeting dalam program pengentasan kemiskinan. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan masih menjadi permasalahan yang sering terjadi, sehingga bantuan yang diberikan tidak selalu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga menyebabkan tumpang tindih program serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola (governance) menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Lebih jauh lagi, aspek geografis dan disparitas wilayah juga menjadi hambatan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta layanan publik. Ketimpangan antar wilayah ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih belum merata, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih berfokus pada pengembangan wilayah tertinggal dan peningkatan konektivitas antar daerah.

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa kemiskinan, ketimpangan, dan hambatan pencapaian SDGs merupakan permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan. Upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan distribusi pendapatan, penguatan kebijakan sosial dan ekonomi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Tanpa adanya sinergi antara berbagai aspek tersebut, target SDGs untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi ketimpangan akan sulit dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami masalah kemiskinan meskipun sudah adanya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) pada September 2025 tingkat kemiskinan sebesar 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa. Penurunan angka ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan yang terjadi, namun angka tersebut masih cukup besar sehingga masih menjadi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan, bukan hanya itu saja akan tetapi kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan juga masih terlihat dimana tingkat kemiskinan di pedesaan itu masih sangat tinggi dibandingkan perkotaan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan masih belum sepenuhnya merata.

Kemiskinan juga tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, bahkan peluang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan akses tersebut menyebabkan masyarakat sulit meningkatkan taraf hidupnya dan berisiko mengalami perangkap kemiskinan (poverty trap).

Bukan hanya kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga menjadi hambatan dalam pembangunan. Tingginya ketimpangan pendapatan juga dapat memperbesar serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Begitu pun sebaliknya, tingginya tingkat kemiskinan turut menghambat akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga memperbesar kesenjangan sosial. Kondisi tersebut sesuai dengan teori cumulative causation yang menjelaskan bahwa ketimpangan cenderung terus berlanjut apabila tidak diatasi melalui intervensi kebijakan yang tepat.

Dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi kendala utama, khususnya dalam pengurangan

kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan distribusi yang merata cenderung akan memperbesar ketimpangan yang ada. Bukan hanya itu saja adanya faktor eksternal seperti pandemi dan masalah krisis ekonomi juga memperburuk kondisi terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan seperti adanya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem perlindungan sosial demi mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan permasalahan yang saling berkaitan dan menjadi hambatan utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menunjukkan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, sehingga menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan yang merata, terutama jika dilihat dari perbedaan wilayah dan kedalaman kemiskinan yang masih cukup tinggi di perdesaan.

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan memperburuk kondisi tersebut melalui distribusi ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan menyebabkan sebagian besar sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung tidak inklusif. Kondisi ini tidak hanya memperlambat penurunan kemiskinan, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial dan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan dan ketimpangan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memperkuat dalam menciptakan hambatan struktural dalam pembangunan.

Implikasi akademis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam mengkaji pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melihat keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara menyeluruh. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara analisis kemiskinan dan ketimpangan dalam studi pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pencapaian SDGs.

Dari sisi kebijakan, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan akses terhadap pekerjaan layak, serta kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, pemerataan pembangunan antar wilayah, khususnya antara perkotaan dan perdesaan, perlu menjadi prioritas utama untuk mengurangi kesenjangan. Tanpa adanya kebijakan yang menyeluruh dan berorientasi pada pemerataan, pencapaian SDGs serta visi Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud secara optimal.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2025*. Jakarta: Badan

Pusat Statistik.

- Chen, S., & Ravallion, M. (2012). More relatively-poor people in a less absolutely-poor world. *World Bank Policy Research Working Paper*. Washington, DC: World Bank.
- Ganie-Rochman, M. (2013). *Ketimpangan sosial dan pembangunan ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty and inequality*. Washington, DC: World Bank.
- Hidayat, R., & Erlyn. (2021). Analisis ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Economia*, 17(2), 123–135.
- Juoro, U. (2013). Ketimpangan dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 1–10.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (Edisi ke-5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestari, D., Putri, A., & Saputra, R. (2023). Pengaruh kemiskinan dan ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 45–58.
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 73–88.
- Ravallion, M. (2012). *Poverty and public policy*. *World Bank Research Observer*, 27(1), 1–25.
- Singh, A., & Chudasama, H. (2020). Reducing poverty through economic growth: Evidence from developing countries. *Journal of Economic Development*, 45(2), 89–112.
- Sruyanti. (2022). Implementasi SDGs desa dalam pembangunan berkelanjutan. *Journal Publicuho*, 5(2), 210–220.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 45–60.
- World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Washington, DC: World Bank.
- Zulyanto, A. (2022). Peran pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. *Convergence: The Journal of Economic Development*